**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986



# PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA KAMPUNG ADAT LAMAHELAN KABUPATEN FLORES TIMUR

**Brigita Ina Tokan, Adi Soesiantoro, Ghulam Mulana Ilman**

[123] Administarsi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Desember, 2025
Revised Desember, 2025
Accepted Desember, 2025
Available Desember, 2025

brigitaina23@gmail.com
adisusiantoro@untag-sby.ac.id
ghulamilman@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**A B S T R A K**

Kampung Adat Lamahelan di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi wisata budaya yang unik dengan tradisi adat,tarian tarian tradisional, dan arsitektur tradisional yang masih terjaga. Pengembangan pariwisata budaya di kampung ini dianalisis menggunakan kerangka 6A Buhalis yang menonjolkan aspek atraksi budaya, aksesibilitas, fasilitas, aktivitas, kelembagaan, dan dukungan masyarakat. Meskipun daya tarik budaya dan partisipasi masyarakat sangat kuat, keterbatasan fasilitas pendukung, akses digital, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan pengembangan. Studi ini menekankan perlunya penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan strategi pemasaran digital untuk mewujudkan pembangunan pariwisata budaya yang berkelanjutan serta memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

**Kata Kunci:Wisata Budaya; Kampung Adat Lamahelan; 6A Buhalis**

***A B S T R A C T***

***The Lamahelan Traditional Village in East Flores, East Nusa Tenggara, possesses unique cultural tourism potential, characterized by well-preserved indigenous traditions and traditional architecture. The development of cultural tourism in this village is analyzed using Buhalis' 6A framework, which highlights cultural attractions, accessibility, amenities, activities, institutional support, and community involvement. Although cultural attractions and community participation are strong, limitations in supporting facilities, digital access, and human resource capacity pose significant challenges. This study emphasizes the need to strengthen infrastructure, enhance institutional capacity, and adopt effective digital marketing strategies to achieve sustainable cultural tourism development and generate socio-economic benefits for the local community***
***Keywords : Cultural Tourism; Lamahelan Traditional Village; Buhalis' 6A Framework***

## PENDAHULUAN

Pariwisata, secara terminologi, merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan individu maupun kelompok menuju suatu destinasi dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan utama rekreasi, hiburan, ataupun pemenuhan kebutuhan personal non-produktif, tanpa adanya maksud untuk mencari penghasilan di lokasi tujuan.Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki bentang geografis luas, dianugerahi keragaman etnis, budaya, adat istiadat, serta kekayaan destinasi wisata yang tersebar di berbagai daerah. Di antara ragam pariwisata yang berkembang, wisata budaya menempati posisi penting karena menitikberatkan pada eksplorasi, pengenalan,

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com




dan pelestarian warisan budaya lokal. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) per Agustus 2025, tercatat sebanyak 6.057 desa wisata tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) per Agustus 2025, tercatat sebanyak 6.057 desa wisata tersebar di seluruh Indonesia. Desa wisata ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori: Desa Wisata Rintisan (4.745 desa), Desa Wisata Berkembang (993 desa), Desa Wisata Maju (320 desa), dan Desa Wisata Mandiri (35 desa). Desa-desa ini umumnya telah mampu menyediakan fasilitas representatif, manajemen profesional, dan pelayanan yang berorientasi pada pengalaman wisatawan.

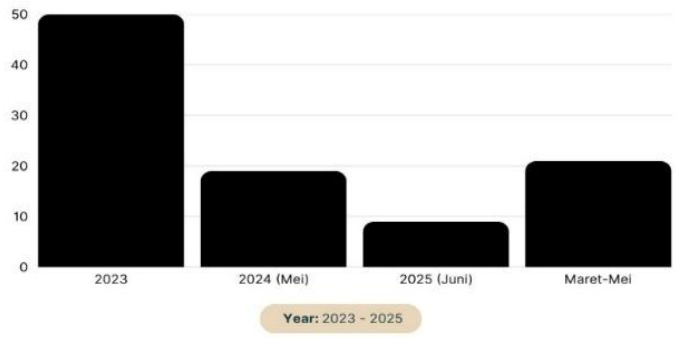
Salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan wisata budaya signifikan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi ini dikenal sebagai kawasan yang kaya akan adat istiadat, ritual tradisional, serta keberadaan kampung adat yang masih lestari. Berdasarkan data, terdapat 167 kampung adat di NTT yang masing-masing menyimpan ciri khas budaya unik. Dalam konteks kabupaten, Flores Timur menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wilayah ini dianugerahi panorama alam memukau, serta kekayaan tradisi yang yang masih terjaga turun temurun.

Salah satu destinasi yang menonjol dalam konteks ini adalah Kampung Adat Lamahelan, yang berlokasi di Desa Helanlangowuyo, Kecamatan Ile Boleng. Keistimewaan kampung ini terletak pada sejarahnya, pelestarian ritual adat, dan struktur bangunan tradisional yang masih terawat, menjadikannya sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Pada bulan April 2024, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengakui Kampung Adat Lamahelan sebagai desa wisata dalam kategori Rintisan. Pengakuan ini menegaskan keberadaannya dalam peta pariwisata Flores Timur dan membuka kesempatan untuk pengembangan lebih lanjut melalui peningkatan daya tarik, sarana, serta pemberdayaan masyarakat setempat.

Keunggulan pariwisata budaya di Lamahelan terlihat jelas dari arsitektur tradisional yang masih terjaga dan tata ruang kampung adat yang telah ada selama ratusan tahun. Rumah adat dan bale adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan penanda sejarah bagi masyarakat Adonara. Keaslian bangunan tersebut menunjukkan keberlangsungan tradisi serta menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin melihat langsung warisan dari nenek moyang. Selain itu, daerah ini menyimpan artefak yang memiliki nilai sejarah dan spiritual, seperti gading, Nubanara, dan patung Soba Ratu yang dianggap sebagai pelindung kampung dan tangga batu yang diwariskan, serta memahami kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generas.Keberadaan benda-benda suci ini tidak hanya bermakna estetis, tetapi juga menjadi pusat keyakinan masyarakat dalam menjaga keseimbangan hidup, sehingga memperkaya pengalaman wisata budaya dengan unsur religius yang mendalam.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986

**Tabel 1.3 Data pengunjung Kampung Adat Lamahelan**




Sumber: diolah dari berita Reportase NTT diakses 19 Agustus 2025

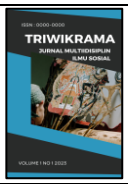
Berdasarkan berita Reportase NTT, yang mencatat melalui Pokdarwis bahwa lebih dari 50 wisatawan asing telah mengunjungi Kampung Adat Lamaholot sepanjang tahun 2023. Antusiasme tersebut terus berlanjut, terlihat pada 12 Mei 2024 ketika sebanyak 19 wisatawan asal Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada datang untuk mengikuti tur budaya yang mencakup observasi arsitektur tradisional dan kerajinan tekstil. Selanjutnya, pada Juni 2025, kampung ini menerima kunjungan resmi dari Indonesia Heritage Society (IHS) yang terdiri dari 9 orang wisatawan mancanegara, berasal dari negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Swiss. Selain itu, pada periode Maret hingga Mei 2025, sejumlah wisatawan lain juga datang untuk mendalami budaya lokal, menunjukkan bahwa minat terhadap warisan budaya Kampung Adat Lamaholot terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dalam praktiknya,Kampung Adat Lamahelan menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan wisata budaya. Terbatasnya akses internet menjadi hambatan utama dalam promosi digital, sementara belum tersedianya akun media sosial resmi dan paket wisata rutin membatasi kemampuan pemasaran secara efektif. Selain itu, fasilitas penunjang seperti homestay, pusat informasi, pendopo, suvenir, area istirahat, dan toilet umum masih minim, sehingga kenyamanan dan pengalaman wisatawan belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penghambat signifikan dalam strategi promosi desa wisata. Padahal, pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi besar untuk menyebarluaskan informasi tentang kekayaan budaya lokal kepada audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Realitas tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kampung Adat Lamahelan memiliki aset budaya yang bernilai tinggi, pengelolaan dan pengembangannya masih membutuhkan perencanaan strategis yang matang.

Berdasarkan Kondisi tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan dengan pendekatan yang komprehensif. Upaya yang dilakukan tidak sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga berfokus pada pelestarian warisan leluhur, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemerataan manfaat ekonomi serta sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana integrasi

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com




antara pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang untuk merumuskan strategi pengelolaan yang efektif dan sesuai dengan karakter lokal. Situasi ini sekaligus mengarahkan perhatian pada tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengembangan Pariwisata

Pemahaman mengenai pengembangan pariwisata menunjukkan bahwa proses ini harus direncanakan secara terpadu untuk memanfaatkan potensi alam, budaya, sejarah, dan kesenian sebagai sumber daya yang bernilai. Konsep 6A yang dikembangkan oleh Buhalis menjadi landasan penting dalam menganalisis pengembangan destinasi wisata, karena setiap komponennya saling berkaitan dan menentukan kualitas, daya saing, serta keberlanjutan pengelolaan pariwisata. Keenam komponen tersebut meliputi:

1. Attraction (Atraksi)
   Atraksi mencakup seluruh elemen yang mampu menarik wisatawan, seperti budaya, tradisi, ritual adat, kesenian, serta keunikan alam Kampung Adat Lamahelan. Atraksi berfungsi sebagai identitas utama destinasi dan merupakan faktor penentu dalam strategi promosi maupun pengembangan wisata.
2. Accessibility (Aksesibilitas)
   Aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan wisatawan mencapai lokasi, meliputi kondisi jalan, transportasi, petunjuk arah, serta sarana pendukung lainnya. Akses yang terbatas dapat menghambat alur kunjungan dan mengurangi minat wisatawan meskipun atraksi budaya sangat kuat.
3. Amenities (Fasilitas Pendukung)
   Fasilitas mencakup toilet umum, area istirahat, pusat informasi, tempat makan, ruang interaksi, dan fasilitas lain yang menunjang kenyamanan wisatawan. Minimnya fasilitas dapat menurunkan kualitas pengalaman wisata dan berdampak pada kepuasan pengunjung.
4. Accommodation (Akomodasi)
   Akomodasi seperti homestay, pondok wisata, atau rumah tinggal masyarakat menjadi penting agar wisatawan dapat tinggal lebih lama dan merasakan pengalaman budaya secara langsung. Akomodasi yang berbasis masyarakat juga memperkuat ekonomi lokal.
5. Activities (Aktivitas)
   Aktivitas wisata yang ditawarkan, seperti pertunjukan adat, ritual budaya, workshop tenun, eksplorasi alam, atau kegiatan edukasi, memberikan nilai tambah dan memperkaya pengalaman pengunjung. Aktivitas yang terstruktur dapat meningkatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat adat.
6. Ancillary Services (Layanan Pendukung)
   Layanan pendukung meliputi peran pemerintah daerah, dinas pariwisata, Pokdarwis, serta lembaga lain dalam menyediakan regulasi, pelatihan, promosi, pendampingan manajemen, dan pengawasan. Dukungan institusional yang kuat menjadi kunci agar pengelolaan destinasi berjalan profesional dan berkelanjutan.

Dengan penekanan pada enam komponen tersebut, analisis pengembangan wisata di Kampung Adat Lamahelan tidak hanya melihat kekuatan atraksi budaya, tetapi juga menilai kesiapan infrastruktur, kualitas layanan, dukungan kelembagaan, serta peran aktif masyarakat dalam membangun destinasi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang berfokus pada pengamatan fenomena secara alami untuk memahami makna peristiwa dalam konteks sosial, di mana penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan faktual kondisi




yang dikaji serta menafsirkan makna pengalaman, pandangan, dan interaksi para aktor dalam pengembangan wisata budaya di Kampung Adat Lamahelan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi langsung dari informan, observasi partisipatif untuk mengamati aktivitas dan situasi sosial, serta dokumentasi untuk memperkuat temuan melalui data tertulis, foto, arsip, dan catatan resmi, sehingga ketiga teknik ini saling melengkapi dan menghasilkan data yang komprehensif. Analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan melalui tahapan reduksi data dengan menyeleksi dan menyederhanakan data, penyajian data dalam bentuk narasi agar hubungan antartema tampak jelas, serta penarikan kesimpulan untuk menginterpretasikan makna temuan dalam menjawab fokus penelitian mengenai pengembangan wisata budaya di Kampung Adat Lamahelan.

## PEMBAHASAN

### Attracion(Atraksi)

Buhalis (2000) menempatkan atraksi sebagai komponen fundamental yang menggerakkan motivasi berwisata melalui nilai budaya, sejarah, serta pengalaman khas yang tidak dapat direplikasi di destinasi lain. Temuan penelitian di Kampung Adat Lamahelan memperlihatkan adanya konsistensi pandangan di antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pariwisata, pemerintah desa, Pokdarwis, tokoh adat, hingga masyarakat dan wisatawan, bahwa kekuatan utama destinasi ini terletak pada budaya yang tetap lestari dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Beragam atraksi seperti rumah adat, ritus penyambutan tamu, prosesi adat, tenun ikat, dan pertunjukan seni tradisional tidak diproduksi khusus untuk kepentingan pariwisata, melainkan merupakan manifestasi autentik dari praktik budaya setempat.

Kesesuaian antara kondisi empiris dan kerangka teoretis tampak jelas dari bagaimana wujud atraksi budaya di Lamahelan memenuhi konsep *cultural authenticity* dan *living tradition*, yang menjadi inti dari daya tarik wisata budaya. Wisatawan menggambarkan pengalaman mereka sebagai "imersif" dan "*intimate*," terutama ketika dilibatkan langsung dalam prosesi adat atau ketika mengamati aktivitas keseharian masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa daya tarik Lamahelan tidak hanya bersifat visual atau representasional, tetapi merupakan pengalaman budaya yang memungkinkan interaksi langsung antara wisatawan dan komunitas lokal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aripradana dan Widayaningsih (2006) di Banyumas serta Amarullah (2023) di Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi faktor dominan dalam menarik kunjungan wisatawan. Namun, konteks Lamahelan menghadirkan kedalaman yang berbeda karena ekspresi budaya yang ditampilkan sepenuhnya dikendalikan oleh lembaga adat, bukan dikonstruksi untuk kepentingan pariwisata. Dalam hal ini, temuan penelitian di Lamahelan lebih mendekati hasil kajian Papalangi (2024) di Toraja, meskipun di Lamahelan otoritas adat tampak lebih kuat sehingga potensi komodifikasi budaya relatif lebih rendah. Konfigurasi tersebut justru menjadi keunikan tersendiri, karena orientasi pengelolaan budaya lebih diarahkan pada keberlanjutan nilai adat daripada pada pertimbangan komersial.

Selain itu, keputusan terkait penyelenggaraan pertunjukan adat maupun pemberian izin dokumentasi budaya ditentukan melalui mekanisme musyawarah adat, bukan keputusan personal. Pola *community-driven management* ini juga tercermin dalam dokumen kebijakan, seperti PERDA Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan, yang menempatkan pelestarian budaya sebagai mandat utama pemerintah daerah. RIPARDA 2013 maupun RPJMD Kabupaten Flores Timur juga menjadikan pengembangan pariwisata berbasis budaya sebagai prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pariwisata dari Dinas Pariwisata turut menegaskan bahwa atraksi adat di Lamahelan diposisikan sebagai bagian dari program pelestarian

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com

budaya, bukan sekadar agenda pengembangan destinasi. Data kunjungan wisata juga menunjukkan peningkatan signifikan untuk destinasi berbasis budaya di wilayah Ile Boleng dalam tiga tahun terakhir.

Dengan demikian, temuan lapangan mengenai kuatnya daya tarik budaya di Lamahelan tidak berdiri secara terpisah, melainkan memperoleh penguatan dari teori, konsistensi dengan penelitian terdahulu, dan dukungan dari kerangka kebijakan resmi daerah. Hal ini menegaskan bahwa atraksi budaya di Kampung Adat Lamahelan merupakan fondasi utama bagi pengembangan destinasi sekaligus memiliki posisi strategis dalam dimensi sosial, adat, dan kebijakan pembangunan daerah.

***Accesssibility(Aksesibilitas)***

Buhalis (2000) menyatakan bahwa aksesibilitas mencakup kemudahan wisatawan untuk mencapai suatu destinasi melalui sarana transportasi fisik serta ketersediaan informasi yang memadai. Hasil penelitian di Kampung Adat Lamahelan menunjukkan bahwa aspek akses fisik menuju lokasi relatif baik, meskipun wilayah tersebut berada di dataran tinggi dengan medan berupa tanjakan dan tikungan tajam. Para narasumber menilai kondisi ini bukan hambatan signifikan karena kontur Pulau Adonara secara umum serupa, sehingga wisatawan dapat menyesuaikan diri dengan mudah. Selain itu, jalan menuju desa telah beraspal dan dapat diakses oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga tidak terdapat kendala berarti dari sisi transportasi fisik.

Permasalahan justru terlihat pada dimensi akses informasi digital. Kualitas jaringan internet yang tidak stabil, minimnya ketersediaan informasi daring, serta promosi yang masih mengandalkan perangkat pribadi anggota Pokdarwis menunjukkan adanya kesenjangan digital yang cukup besar. Hambatan ini bukan hanya menyulitkan komunikasi dengan wisatawan, tetapi juga menghambat penyebaran informasi terkait paket wisata, jadwal kunjungan, hingga memperlambat proses reservasi. Dengan demikian, isu aksesibilitas di Lamahelan lebih menonjol pada *informational accessibility* daripada pada akses fisik.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmani et al. (2023) di Gili Gede yang menyoroti bahwa destinasi dengan potensi besar kerap terhambat oleh keterbatasan fasilitas dasar dan infrastruktur informasi. Amarullah (2021) di Yogyakarta juga menekankan bahwa akses informasi digital merupakan faktor penting dalam menarik minat wisatawan modern, khususnya generasi muda yang mengandalkan media sosial sebelum menentukan tujuan perjalanan. Situasi di Lamahelan mencerminkan pola serupa: potensi budaya sangat kuat, tetapi kurang terekspos karena minimnya digitalisasi.

Dari perspektif teori pengembangan desa wisata budaya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjangkau lokasi, tetapi juga dengan akses wisatawan terhadap informasi mengenai nilai budaya yang ditawarkan desa. Minimnya digitalisasi membuat kekayaan budaya Lamahelan kurang terdokumentasi dan tidak tersebar secara luas, sehingga atraksi budaya yang sebenarnya kuat tidak dapat berfungsi optimal sebagai daya tarik. Ketika informasi mengenai kegiatan adat, paket wisata, ataupun keunikan budaya tidak tersedia secara daring, wisatawan berpotensi mengabaikan destinasi ini dan memilih lokasi lain yang informasinya lebih mudah diperoleh.

Keterbatasan akses informasi ini turut tercermin dalam dokumen kebijakan pemerintah. PERDA Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 memang menegaskan perlunya fasilitas penunjang kebudayaan, tetapi implementasi fasilitas digital di Desa Helan Langowuyo belum terlihat. RIPARDA Kabupaten Flores Timur juga menggarisbawahi pentingnya promosi pariwisata berbasis teknologi, namun desa ini belum menjadi fokus program digitalisasi. Dokumen perencanaan wisata




budaya dari Dinas Pariwisata menunjukkan perlunya peningkatan promosi digital serta penyediaan fasilitas informasi terpadu, sementara data kunjungan wisata memperlihatkan bahwa destinasi yang memiliki promosi digital lebih intensif menunjukkan peningkatan kunjungan yang lebih cepat dibandingkan destinasi yang belum terdigitalisasi.

Secara keseluruhan, aksesibilitas di Kampung Adat Lamahelan tidak menimbulkan persoalan dalam hal transportasi fisik, tetapi masih lemah pada aspek akses informasi digital. Keterbatasan ini berdampak langsung pada visibilitas destinasi dan mengurangi peluang desa untuk menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur digital dan peningkatan promosi daring menjadi strategi penting agar potensi budaya Lamahelan dapat tersampaikan secara efektif dan tetap kompetitif dalam lanskap pariwisata modern.

***Aminities(Fasilitas Pendukung)***

Menurut Buhalis, aminities mencakup seluruh fasilitas pendukung yang memungkinkan wisatawan memperoleh kenyamanan selama berkunjung, mulai dari toilet, area parkir, tempat makan, *shelter*, hingga pusat informasi. Temuan di Kampung Adat Lamahelan menunjukkan bahwa fasilitas dasar tersebut tersedia, tetapi masih berada pada tingkat yang sangat sederhana. Toilet sudah dibangun, namun kualitasnya terbatas dan sering menghadapi kendala pasokan air. Area parkir memanfaatkan lahan kosong dan lapangan voli, sementara gazebo digunakan secara multifungsi, baik untuk rapat maupun sebagai tempat beristirahat wisatawan. Hingga kini belum tersedia tempat makan khusus, sehingga kebutuhan konsumsi wisatawan harus dipesan langsung kepada masyarakat melalui sistem *pre-order*.

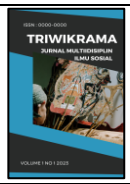
Para narasumber dari pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat menegaskan bahwa peningkatan sanitasi dan penambahan fasilitas istirahat merupakan kebutuhan paling mendesak. Wisatawan yang diwawancarai juga menyampaikan bahwa kesederhanaan fasilitas bukan masalah utama selama lingkungan tetap bersih dan masyarakat memberikan layanan yang hangat. Temuan ini menunjukkan bahwa kenyamanan wisatawan di Lamahelan lebih banyak ditopang oleh kualitas pelayanan berbasis komunitas daripada kelengkapan fisik amenitas.

Meski demikian, kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kuatnya potensi budaya dan sarana pendukung yang belum memadai. Dalam teori pengembangan destinasi, keterbatasan amenitas dapat menurunkan durasi kunjungan dan mengurangi peluang wisatawan untuk mengikuti lebih banyak aktivitas budaya. Dengan kata lain, potensi atraksi budaya tidak dapat dimaksimalkan apabila fasilitas dasar belum mendukung kenyamanan wisatawan secara optimal.

Hasil ini sejalan dengan temuan Dwi et al. (2023) di Desa Wisata Osing yang menunjukkan bahwa fasilitas pendukung yang memadai berpengaruh langsung terhadap kenyamanan pengunjung dan keberlanjutan destinasi. Namun, konteks Lamahelan memiliki kompleksitas tersendiri: pembangunan fasilitas tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus mempertimbangkan aturan adat, pola ruang kampung, serta kontur geografis pegunungan yang membatasi ruang fisik untuk pembangunan. Artinya, peningkatan amenitas tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas baru, tetapi juga memastikan bahwa penataan ruang tetap harmonis dengan nilai adat dan kesakralan kampung.

Dalam perspektif pengembangan desa wisata budaya, kondisi amenitas di Lamahelan mencerminkan pola pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal, di mana fasilitas dibuat secukupnya agar tidak mengganggu struktur adat dan identitas kampung. Namun, pendekatan ini membawa konsekuensi bahwa kenyamanan wisatawan tetap sangat bergantung pada kesiapan masyarakat, dan tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dukungan infrastruktur fisik. Situasi ini

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com




berpotensi menjadi tantangan ketika jumlah kunjungan meningkat, mengingat kapasitas layanan berbasis komunitas memiliki batas tertentu.

Keterbatasan amenitas juga ditegaskan dalam berbagai dokumen perencanaan pemerintah. Dokumen perencanaan wisata budaya Dinas Pariwisata Flores Timur mencatat bahwa fasilitas pendukung di sejumlah desa wisata budaya, termasuk Lamahelan, masih tergolong minimal. RPJMD Kabupaten Flores Timur juga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur dasar bagi desa wisata, sementara PERDA penyelenggaraan kebudayaan mengamanatkan dukungan sarana budaya dan ruang publik yang dalam konteks Lamahelan belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini konsisten dengan data kunjungan wisata yang menunjukkan fluktuasi, sebagian dipengaruhi oleh rendahnya kenyamanan fasilitas bagi wisatawan.

Secara keseluruhan, aminities di Kampung Adat Lamahelan dapat dikategorikan sebagai fasilitas dasar yang cukup fungsional namun belum optimal. Meskipun keramahan masyarakat mampu menutupi sejumlah keterbatasan, peningkatan sanitasi, penyediaan ruang istirahat yang layak, dan penguatan infrastruktur pendukung tetap menjadi kebutuhan mendesak agar kenyamanan wisatawan meningkat dan keberlanjutan destinasi budaya dapat terjaga.

**Acommodation(Akomodasi)**

Dalam kerangka 6A Buhalis (2000), akomodasi dipahami sebagai elemen strategis yang menunjukkan tingkat kesiapan destinasi dalam menerima wisatawan, sekaligus menjadi ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya. Pada destinasi berbasis adat seperti Kampung Adat Lamahelan, akomodasi idealnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga merepresentasikan struktur ruang adat, nilai budaya, dan pola hidup masyarakat setempat.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa akomodasi di Lamahelan masih berada pada tahap awal pengembangan dan bersifat informal. Seluruh informan, pemerintah desa, Pokdarwis, tokoh adat, dan Masyarakat, menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat *homestay* resmi yang memenuhi standar pariwisata. Sebagai respons, muncul bentuk adaptasi berupa pemanfaatan rumah warga yang tidak ditempati sebagai tempat menginap wisatawan. Pokdarwis mengoordinasikan layanan ini dengan menyediakan tempat tidur sederhana, konsumsi, serta orientasi adat bagi wisatawan. Skema biaya Rp200.000 per orang per hari memperlihatkan bahwa layanan akomodasi mulai bergerak dari praktik sukarela menuju bentuk semi-komersial berbasis komunitas.

Kondisi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kekurangan fasilitas, tetapi menunjukkan bahwa kesiapan akomodasi dibatasi oleh faktor manajerial, kapasitas kelembagaan, serta regulasi adat. Pembangunan homestay pada kampung adat tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus menyesuaikan batas-batas ruang sakral, pola permukiman adat, dan persetujuan tokoh adat. Dengan demikian, keterbatasan akomodasi tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, melainkan juga oleh struktur sosial-budaya yang menjadi pengatur utama di kampung adat.

Data sekunder turut mengonfirmasi kondisi ini. Dokumen LAPID, Profil Desa, dan Rencana Pembangunan Desa tidak memuat rencana pengembangan *homestay*. Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur pun belum mengategorikan Lamahelan sebagai desa yang siap menerima pelatihan *homestay*, karena kelembagaan lokal dan kapasitas SDM masih berada pada tahap awal pengembangan destinasi. Program pelatihan diarahkan terlebih dahulu kepada desa yang dinilai lebih siap, seperti Desa Lewokluok. Dengan demikian, absennya *homestay* formal di Lamahelan bukan hanya terkait ketiadaan bangunan, melainkan karena kesiapan lembaga dan harmonisasi antara aturan adat dan pemerintah desa yang masih berproses.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986




Temuan ini sejalan dengan teori pengembangan desa budaya, yang menekankan bahwa akomodasi pada wilayah adat perlu berkembang secara bertahap, adaptif, dan berbasis kesiapan komunitas. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip *Community-Based Tourism (CBT)* (Setyani et al., 2024; Choenkwan, 2025), yang menegaskan bahwa homestay sebaiknya dikelola oleh komunitas dan tetap mempertahankan identitas budaya lokal. Tokoh adat di Lamahelan juga menekankan bahwa pembangunan *homestay* diperbolehkan selama tidak mengganggu wilayah sakral dan mengikuti struktur adat, sehingga proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara cepat.

Jika dibandingkan dengan penelitian Mahardika (2021) mengenai *homestay* di desa wisata Bali, perbedaannya sangat jelas. *Homestay* di Bali telah memiliki standar layanan, sistem tata kelola yang rapi, dan integrasi dengan paket wisata. Sementara itu, akomodasi di Lamahelan berada pada fase transisi: layanan penginapan sudah mulai tersedia, tetapi standar operasional, regulasi, dan kelembagaan belum terbentuk. Kondisi ini justru membuka peluang karena masyarakat belum terpengaruh oleh komersialisasi yang berlebihan, sehingga arah pengembangan *homestay* masih dapat dipandu sesuai nilai adat dan kearifan lokal.

Secara kritis, ketiadaan akomodasi formal berdampak pada durasi tinggal wisatawan. Wisatawan yang kurang terbiasa dengan fasilitas sederhana cenderung memilih kunjungan singkat, sehingga kesempatan untuk mengikuti aktivitas budaya secara penuh menjadi terbatas. Dampak lainnya adalah terhambatnya potensi ekonomi *homestay* karena belum adanya struktur layanan yang baku.

Secara keseluruhan, akomodasi di Kampung Adat Lamahelan berada pada fase awal pengembangan dengan pola informal yang mulai bergerak menuju bentuk layanan semi-terstruktur. Meskipun fasilitas masih sederhana, pola ini mencerminkan kesiapan sosial serta kekuatan modal budaya masyarakat. Dengan penguatan kapasitas komunitas, perencanaan akomodasi berbasis nilai adat, dan dukungan bertahap dari pemerintah, akomodasi di Lamahelan memiliki peluang berkembang menjadi *homestay* komunitas yang autentik, berkelanjutan, dan tetap selaras dengan identitas adat sebagai inti destinasi.

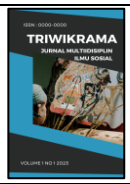
**Activities(Aktivitas/Kegiatan)**

Dalam kerangka 6A Buhalis (2000), aktivitas menjadi unsur penting yang menentukan kualitas pengalaman wisatawan sekaligus membedakan nilai sebuah destinasi. Di Kampung Adat Lamahelan, aktivitas wisata bersumber dari praktik budaya yang masih dijalankan masyarakat, seperti penyambutan adat, tarian tradisional, demo tenun, pendampingan berkeliling kampung, serta penyampaian sejarah adat. Seluruh aktivitas dijalankan berdasarkan musyawarah adat dan mengikuti aturan kesakralan serta batas-batas budaya yang harus dihormati.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas budaya di Lamahelan sangat kaya, pengelolaannya masih menghadapi tantangan dari sisi manajerial. Informan menyebutkan bahwa pelaksanaan aktivitas sangat bergantung pada ketersediaan penari, tokoh adat, maupun pengrajin, dan belum memiliki pembagian peran formal atau standar operasional layanan. Dengan kata lain, kekuatan aktivitas terletak pada substansi budayanya, tetapi belum diimbangi dengan struktur layanan yang memadai.

Di sisi lain, Pokdarwis telah menyusun paket aktivitas sebagai langkah awal penataan destinasi. Paket tersebut mencantumkan jenis atraksi beserta tarifnya, seperti pemandu Rp350.000, tarian Gawi Au Rp400.000, tarian Sole Rp1.000.000, demo tenun Rp600.000, welcome drink Rp20.000, dan dokumentasi Rp250.000. Beberapa ritus seperti Helog Hekat dan memberi makan gunung tidak dimasukkan karena bersifat sakral. Paket ini menunjukkan inisiatif

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com




pengelolaan berbasis komunitas, tetapi belum menjamin keberlanjutan karena belum disertai standardisasi layanan, peningkatan kapasitas pelaku, maupun kesiapan infrastruktur pendukung.

Secara kritis, paket aktivitas tersebut mencerminkan dualitas kondisi di Lamahelan. Dari sisi budaya, aktivitas sangat otentik dan memiliki nilai tinggi. Namun dari sisi kesiapan destinasi, pelaksanaannya belum stabil karena terbatasnya jumlah pelaku, ketiadaan jadwal yang pasti, fasilitas pendukung yang minimal (misalnya area pertunjukan, ruang demonstrasi, pusat suvenir), serta absennya SOP kualitas layanan. Dalam konsep *experiential cultural tourism*, aktivitas autentik memang menjadi inti pengalaman wisata. Namun dalam konteks Lamahelan, minimnya struktur kelembagaan membuat pengalaman wisata sangat bergantung pada ketersediaan individu pelaku budaya, bukan pada sistem destinasi yang terkelola.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Mahardika (2021) dan Setyani et al. (2024), yang menunjukkan bahwa destinasi budaya yang berkembang justru memiliki SOP yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, serta mekanisme penyajian budaya yang tetap menjaga otentisitas. Data sekunder seperti Profil Desa dan LAPID menegaskan bahwa aktivitas adat memang menjadi prioritas pembangunan desa, tetapi belum terdapat kebijakan yang secara khusus mengatur standardisasi paket wisata, pelatihan pemandu, atau sistem kontrol kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desa dan kapasitas masyarakat belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pengembangan aktivitas wisata.

Dengan demikian, aktivitas wisata di Kampung Adat Lamahelan saat ini berada pada fase transisi: nilai budayanya kuat, minat wisatawan sudah terlihat, dan harga paket relatif wajar bahkan menarik bagi wisatawan mancanegara, tetapi aspek manajerial dan kualitas layanan masih perlu ditingkatkan. Jika aktivitas tidak dikelola secara lebih profesional, potensi budaya yang besar dapat terhambat untuk berkembang menjadi keunggulan destinasi. Sebaliknya, dengan penguatan tata kelola melalui pelatihan, penyusunan SOP, serta koordinasi antara adat, pemerintah desa, dan Pokdarwis, aktivitas di Lamahelan dapat berkembang menjadi pengalaman wisata budaya yang unggul, autentik, dan berkelanjutan.

**Ancillary Service(Layanan Pendukung)**

Dalam kerangka 6A Buhalis (2000), *ancillary services* mencakup dukungan kelembagaan, pelatihan SDM, kebijakan publik, dan koordinasi multipihak yang memastikan destinasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Artinya, meskipun atraksi dan fasilitas fisik sudah tersedia, destinasi tidak akan berkembang tanpa fondasi manajerial yang kuat. Elemen pendukung inilah yang membedakan destinasi yang sekadar “bertahan” dari destinasi yang siap bersaing.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa layanan pendukung di Kampung Adat Lamahelan sudah terbentuk, tetapi masih pada tahap awal dan belum stabil. Kelembagaan Pokdarwis, pemerintah desa, dan lembaga adat memang saling bekerja sama, namun sifatnya masih organik dan informal. Koordinasi berjalan baik dalam konteks adat, tetapi belum memenuhi kebutuhan tata kelola pariwisata modern yang menuntut struktur, SOP, dan sistem koordinasi yang konsisten. Kondisi ini menegaskan adanya *gap* antara konsep ideal dalam 6A dan realitas pengelolaan di lapangan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur merupakan aktor yang paling konsisten memberikan penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen desa wisata, keamanan destinasi, dan *local champion*. Namun, program ini berhenti pada pelatihan dasar tanpa keberlanjutan atau pendampingan jangka panjang. Hal ini penting dikritisi karena penelitian Mahardika (2021) dan Choenkwan (2025) menegaskan bahwa pelatihan berkelanjutan adalah faktor utama keberhasilan destinasi budaya. Di Lamahelan, peningkatan kapasitas baru mencapai level awal dan belum menghasilkan profesionalisasi.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986




Dari sisi kebijakan, dokumen seperti LAPID dan RPJMDes menunjukkan bahwa pariwisata belum menjadi prioritas anggaran desa. Tidak adanya alokasi untuk pelatihan lanjutan, promosi digital, maupun penguatan kelembagaan mencerminkan bahwa *ancillary services* belum dianggap sebagai kebutuhan strategis. Wawancara mendukung temuan ini: pemerintah desa lebih berfungsi sebagai koordinator, bukan penyedia dukungan operasional. Situasi ini menyebabkan Pokdarwis bekerja dengan sumber daya minim dan mengandalkan relawan.

Pokdarwis justru menjadi aktor paling aktif secara operasional, mulai dari pemanduan, penerimaan tamu, promosi mandiri, hingga membangun jejaring dengan agen perjalanan luar negeri. Namun, ketergantungan pada inisiatif individu menjadikan sistem rentan: tidak ada SOP, pembagian tugas yang jelas, atau rencana promosi berbasis institusi. Ketika tugas strategis dan operasional bergantung pada sedikit orang, keberlanjutan destinasi menjadi tidak stabil.

Peran masyarakat juga signifikan dalam hal hospitalitas dan kebersihan lingkungan, tetapi keterbatasan kemampuan bahasa Inggris menjadi hambatan langsung bagi kualitas layanan, terutama karena wisatawan mancanegara mendominasi kunjungan. Hambatan ini memengaruhi kualitas pemanduan, penyampaian informasi budaya, dan pengelolaan ekspektasi wisatawan.

Tokoh adat memegang peran penting dalam memastikan seluruh aktivitas wisata selaras dengan aturan adat. Keunikan ini memperkuat otentisitas destinasi, namun pada saat yang sama memperlambat pengambilan keputusan karena segala hal harus melalui musyawarah adat. Dalam teori pengembangan desa wisata berbasis budaya, keseimbangan antara adat dan tata kelola modern adalah kunci; Lamahelan masih berada dalam tahap negosiasi antara keduanya.

Persepsi wisatawan menunjukkan bahwa layanan pendukung sudah berjalan, tetapi belum matang. Pemanduan dan kebersihan dinilai baik, namun informasi wisata, fasilitas publik, dan layanan kuliner masih minim. Ini menunjukkan adanya *service quality gap* yang perlu diatasi agar pengalaman wisata tidak bergantung pada keberuntungan atau kondisi hari itu.

Secara keseluruhan, perbandingan dengan penelitian Mahardika (2021) dan Choenkwan (2025) menegaskan bahwa destinasi budaya yang berhasil ditopang oleh koordinasi multipihak yang kuat, alokasi anggaran rutin, dan pelatihan berkelanjutan. Dalam konteks Lamahelan, ketiga komponen tersebut masih berkembang perlahan dan belum terstruktur, karena terlalu bergantung pada inisiatif komunitas dan minim dukungan kelembagaan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pengembangan wisata budaya di Kampung Adat Lamahelan terutama berasal dari kekuatan internal komunitas, khususnya modal sosial dan struktur adat yang kuat. Modal sosial tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan. Warga memiliki rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kampung adat serta aset budayanya, sehingga setiap kegiatan wisata dijalankan secara gotong royong. Kohesi sosial juga sangat terlihat melalui solidaritas antar-keluarga, pembagian peran adat, serta koordinasi yang tertata dalam penyambutan tamu. Kondisi ini menciptakan stabilitas sosial yang penting bagi keberlanjutan wisata berbasis komunitas.

Selain itu, sistem adat yang berfungsi sebagai landasan regulasi sosial menjadi faktor pendukung signifikan. Kepemimpinan adat memegang peran kunci dalam menentukan aktivitas apa saja yang boleh dipertontonkan kepada wisatawan, sehingga pengembangan destinasi berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Proses ini menumbuhkan legitimasi sosial yang kuat karena setiap keputusan pariwisata disetujui oleh pemangku kepentingan adat. Dalam konteks pariwisata

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com

budaya, mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol untuk menjaga agar nilai-nilai budaya tidak terdegradasi akibat tekanan ekonomi.

Destinasi ini juga memiliki kekayaan sumber daya budaya yang melimpah, mulai dari arsitektur rumah adat, sistem ritual, tarian dan musik tradisional, hingga narasi sejarah yang panjang. Lanskap alam yang masih asli dan tata ruang kampung yang khas menambah daya tarik visual bagi wisatawan. Keragaman elemen budaya ini memungkinkan pengembangan berbagai bentuk aktivitas wisata edukatif dan interpretatif. Sementara itu, sikap masyarakat yang terbuka terhadap kehadiran wisatawan, namun tetap menjaga prinsip pelestarian budaya, menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan (*utilization and preservation*). Komitmen masyarakat untuk mempertahankan otentisitas ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Namun, di balik sejumlah potensi tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan. Dari sisi geografis, lokasi Kampung Adat Lamahelan yang berada di wilayah perbukitan menyebabkan akses menuju kampung mengalami keterbatasan. Topografi yang menanjak dan jalur yang relatif sempit membatasi kunjungan terutama bagi wisatawan yang tidak terbiasa dengan kondisi tersebut. Hambatan geografis ini juga berdampak pada terbatasnya jaringan telekomunikasi, sehingga akses informasi mengenai destinasi menjadi sangat minimal. Dalam era digital, keterbatasan akses informasi ini menghambat promosi serta visibilitas destinasi di platform online yang kini menjadi sumber informasi utama wisatawan.

Dari aspek fasilitas, amenities dasar seperti toilet, area istirahat, dan titik-titik layanan pengunjung masih belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas pengalaman wisata, terutama bagi pengunjung yang memiliki ekspektasi terhadap kenyamanan dasar. Kurangnya fasilitas air bersih yang stabil, area teduh, atau signage informasi juga turut mengurangi pengalaman wisata secara keseluruhan.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan modal teknis dan kapasitas manajerial masyarakat. Kemampuan digital, baik untuk promosi maupun manajemen reservasi, masih rendah. Belum terdapat SOP layanan wisata, tidak ada pelatihan hospitality yang terstruktur, dan manajemen destinasi belum berjalan secara profesional. Ketiadaan struktur organisasi pariwisata yang formal membuat pembagian peran seringkali bersifat situasional dan bergantung pada inisiatif individu tertentu. Selain itu, belum adanya akomodasi standar dan paket wisata profesional menyebabkan destinasi sulit bersaing dengan destinasi budaya lainnya yang sudah lebih siap secara infrastruktur.

Selektivitas masyarakat dalam mengkomodifikasi budaya juga menjadi hambatan sekaligus kekuatan. Meskipun langkah ini penting untuk menjaga pelestarian adat, pembatasan ini secara tidak langsung mengurangi potensi diversifikasi produk wisata dan pertumbuhan ekonomi. Komodifikasi budaya yang sangat selektif menyebabkan pengembangan berjalan lambat dan tidak bisa mengikuti ritme permintaan pasar yang cenderung menginginkan variasi aktivitas.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata budaya di Kampung Adat Lamahelan sangat bertumpu pada kekuatan budaya, modal sosial, dan legitimasi adat. Namun demikian, keterbatasan teknis, infrastruktur, akses informasi, serta kapasitas manajerial merupakan kendala utama yang perlu mendapatkan perhatian apabila destinasi ingin bergerak menuju tahap perkembangan yang lebih matang. Pengembangan selanjutnya membutuhkan intervensi terarah yang tetap menghormati sistem adat, namun memperkuat aspek-aspek teknis agar keberlanjutan destinasi semakin terjamin.

## 4.SIMPULAN DAN SARAN

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 11 No 9, 2025
E-ISSN: 2988-1986




## Simpulan

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan kerangka 6A Buhalis (2000), dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan telah berjalan dengan mengandalkan kekuatan utama pada aspek atraksi, yaitu budaya lokal yang masih terpelihara dan dipraktikkan secara turun-temurun. Berbagai ritual adat, rumah adat, kerajinan tenun, serta bentuk-bentuk kesenian tradisional menjadi daya tarik yang autentik dan membentuk karakter khas destinasi. Aksesibilitas fisik menuju kampung dapat dikatakan memadai, meskipun akses digital masih menjadi hambatan signifikan bagi promosi dan komunikasi wisata. Fasilitas dan akomodasi masih berada pada tahap awal dan belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan, sementara aktivitas wisata telah berkembang melalui berbagai kegiatan budaya yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. Pada aspek kelembagaan, koordinasi antara Pokdarwis, pemerintah desa, dan lembaga adat sudah terbentuk tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas, pendanaan, dan tata kelola yang lebih sistematis agar pengembangan destinasi dapat berjalan optimal.
2. Menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendukung utama pengembangan pariwisata di Kampung Adat Lamahelan terletak pada kekayaan budaya yang autentik, antusiasme masyarakat adat dalam menerima wisatawan, serta peran lembaga adat yang menjaga keberlangsungan nilai budaya. Selain itu, keterlibatan Pokdarwis dan hubungan baik antarpemangku kepentingan membantu memperkuat dinamika pengembangan destinasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang membatasi perkembangan pariwisata, seperti keterbatasan fasilitas dasar, belum adanya homestay formal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan dan manajemen destinasi, serta akses internet yang lemah sehingga menghambat promosi digital. Keterbatasan pendanaan dan proses pembangunan yang harus diselaraskan dengan ketentuan adat juga memperlambat peningkatan kualitas layanan wisata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan telah memiliki fondasi kuat pada aspek budaya dan partisipasi masyarakat, namun tetap membutuhkan penguatan dari sisi fasilitas, infrastruktur, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Lamahelan serta analisis terhadap faktor pendukung dan penghambatnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.

1. Disarankan kepada pemerintah desa, lembaga adat, dan Pokdarwis untuk memperkuat koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pariwisata. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyusunan program kerja bersama yang lebih terstruktur, penyelarasan peran antar-lembaga, serta peningkatan komunikasi rutin dalam pengelolaan atraksi budaya maupun pelayanan wisatawan. Penguatan koordinasi ini penting agar proses pengembangan destinasi berjalan konsisten dan tidak terhambat oleh perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan.

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com




2. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur, diharapkan memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal. Pelatihan terkait manajemen destinasi, guiding, hospitality, pemasaran digital, hingga pengelolaan homestay perlu diadakan secara berkala agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola wisata secara profesional tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang sudah ada.
3. Infrastruktur pendukung pariwisata perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama fasilitas dasar dan akses digital. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas seperti toilet, titik informasi, area istirahat, serta memperbaiki jaringan internet di kawasan Kampung Adat Lamahelan. Penguatan infrastruktur ini penting agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang nyaman dan agar promosi berbasis digital dapat terlaksana secara optimal.
4. Penguatan promosi wisata budaya perlu dilakukan melalui strategi pemasaran yang lebih terarah. Pengelola wisata disarankan untuk memanfaatkan media sosial secara lebih konsisten, bekerjasama dengan komunitas kreatif, serta menjalin kemitraan dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun pelaku industri perjalanan. Upaya promosi yang berkelanjutan akan membantu memperluas jangkauan informasi mengenai keunikan budaya Kampung Adat Lamahelan dan meningkatkan jumlah kunjungan.
5. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek ekonomi budaya dalam pengembangan pariwisata di Kampung Adat Lamahelan, misalnya terkait model bisnis pariwisata adat, dampak ekonomi bagi rumah tangga adat, maupun dinamika konservasi budaya di tengah komersialisasi. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method juga dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan pariwisata adat secara jangka panjang.

## 5.DAFTAR PUSTAKA

Amarullah, R. (2021). *Pengaruh aksesibilitas digital terhadap minat kunjungan wisatawan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Amarullah, R. (2023). *Budaya lokal sebagai daya tarik wisata budaya di Yogyakarta*. Jurnal Pariwisata dan Budaya, 12(2), 101–115.

Aripradana, A., & Widayaningsih, N. (2006). *Peran budaya lokal dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Pembangunan Daerah, 4(1), 45–56.

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. *Tourism Management, 21*(1), 97–116.

Nasution, A. (2023). *Metodologi penelitian grounded theory*. Jakarta: Rineka Cipta.

Papalangi, M. (2024). *Autentisitas budaya dalam praktik pariwisata Toraja*. Jurnal Antropologi Nusantara, 9(1), 55–72.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2020). *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan*. Larantuka: Pemerintah Kabupaten Flores Timur.




Pemerintah Kabupaten Flores Timur. (2013). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah*. Larantuka: Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Rahmani, S., Widodo, A., & Lestari, Y. (2023). Kesenjangan fasilitas dasar pada destinasi pesisir: Studi kasus Gili Gede. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 5*(3), 210–223.

Reportase NTT. (2025). *Kunjungan wisatawan mancanegara di Kampung Adat Lamaholot meningkat*. Diakses 19 Agustus 2025.

*Corresponding author
E-mail addresses: brigitaina23@gmail.com